

**KOMUNIKASI DALAM SISTEM
DEMOKRASI INDONESIA DAN
STRATEGI MENGHADAPI
ANCAMAN GLOBAL
TERKINI**

Editor:

**Fransiskus X. Gian Tue Mali, M.Si
Angel Damayanti, M.Si.,M.Sc.,Ph.D**

UKI PRESS

2018

DAFTAR ISI

Prolog	
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xii
Komunikasi dalam Sistem Demokrasi di Indonesia Hikmat dan Kebijakanaksanaan Salah Satu Pokok Daya Hidup Demokrasi (Menggali Demokrasi dalam Sila Kerakyatan Indonesia) Oleh : Dr. Osbin Samosir, M.Si	1
Apa dan Bagaimana Konsep Komunikasi Berwawasan Kebangsaan itu ? Oleh : Dr. Chontina Siahaan, SH., M.Si	49
Membangun Citra Politikus dalam Strategi <i>Media Massa</i> Sebagai <i>Public Rekatons</i> Oleh : Donal Adrian, M.Ikom.....	91
Mencermati Gerakan Generasi Ketiga Papua Oleh : Dr. Yugiantie Solaiman, M.A	131
Menyorot Faktor Dominan Pendorong Amerika Latin Mengadopsi Model Neoliberalisme (Neloberalisme di Amerika Latin) Oleh Imelda Masni Juniaty Sianipar, M.A.	158

Perang Myanmar Melawan Narkoba Menuju Kebijakan yang Lebih Manusiawi?

Oleh : V. L Sinta Herindrasti, M.A..... 194

Implikasi Pendirian Badan Siber Nasional dan Sandi Negara (BSSN) Terhadap Penguatan Kapasitas Keamanan Siber Indonesia Menyongsong Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN 2025.

Oleh : Indah Novitasari, S.Sos., M.Si (Han).....225

Strategi Indonesia dalam Mengelola Wilayah Perbatasan Laut Indonesia Dengan Filipina di Laut Sulawesi Utara. (Studi Kasus : Pulau-Pulau Terluar)

Oleh Siti Merida Hutagalung, SH., MH.258

telah mendukung penyusunan buku ini baik dari segi moral maupun material.

Kami menyadari bahwa buku ini belum sempurna baik secara konteks maupun konten, karenanya kami terbuka terhadap saran dan kritik demi perbaikan ke depannya. Akhir kata, kami mengucapkan selamat menikmati dan semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Februari 2018

Dekan

Angel Damayanti, Ph.D

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan karunia-Nya, buku yang berjudul “Komunikasi dalam Sistem Demokrasi Indonesia dan Strategi Menghadapi Ancaman Globa Terkinil” ini dapat terbit. Buku ini merupakan hasil pemikiran dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang terangkum sebagai bukti nyata peranan para akademisi dalam menanggapi dinamika yang ada di negara Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

Sesuai judulnya, buku ini mengulas tentang pentingnya komunikasi dalam sistem politik Indonesia yang lebih demokratis serta strategi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam mengatasi berbagai ancaman terkini. Oleh karena itu, kami berharap buku ini dapat memperkaya pengetahuan para mahasiswa dan pembaca lainnya mengenai perubahan sosial, politik dan ekonomi yang terjadi saat ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh penulis yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan pihak-pihak lainnya yang telah membantu merealisasikan terbitnya buku ini. Terima kasih juga kami haturkan kepada pihak Universitas Kristen Indonesia yang

PROLOG

Buku “Komunikasi dalam Sistem Demokrasi Indonesia dan Strategi Menghadapi Ancaman Global Terkini” merupakan buku yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Kristen Indonesia (UKI) dalam rangka Dies Natalis Fisipol UKI ke-23. Buku ini berisi karya tulis ilmiah yang memuat konsep-konsep, kritik dan pendapat para akademisi dalam menyikapi berbagai dinamika yang terjadi di Indonesia, kawasan Asia Tenggara dan internasional. Buku ini juga merupakan buah pemikiran para dosen Fisipol UKI, yang mencakup aspek politik, hukum, keamanan, ekonomi, pembangunan nasional, dan sosial budaya. Perubahan sosial dan politik yang dinamis baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional menjadi salah satu alasan bagi para dosen untuk menjadikannya sebagai bahan kajian.

Dalam konteks politik nasional, salah satu aspek yang dikaji dalam tulisan ini berkaitan dengan penerapan ideologi dan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Hal ini pada hakikatnya berawal dari adanya degradasi terhadap pemaknaan dan penghayatan, serta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga penulis pertama dalam buku ini, Osbin Samosir

mencatat perlu dilaksanakannya penyebarluasan makna Pancasila yang meliputi pengakuan terhadap eksistensi Tuhan, pengakuan terhadap perikemanusiaan dan HAM, integrasi nasional, pelaksanaan demokrasi tidak langsung yang didasarkan pada permusyawaratan, serta penerapan keadilan sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Upaya penyebarluasan makna Pancasila yang tertuang dalam tulisannya, "Hikmat dan Kebijaksanaan Salah Satu Pokok Daya Hidup Demokrasi: Menggali Demokrasi dalam Sila Kerakyatan Indonesia," diperlukan sebagai salah satu langkah penting dalam rangka menjadikan Pancasila sebagai Ideologi Negara.

Jika kita berkaca pada makna Pancasila tentu sudah dapat dilihat bahwa Pancasila tidak hanya bisa menjadi jiwa bangsa yang mengisi kerangka negara, tetapi juga menjadi dasar pendirian (perjanjian sosial) dan menjadi tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pengakuan nilai-nilai religius, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan yang merupakan nilai-nilai dominan yang hidup dalam sebuah kelompok masyarakat dewasa ini. Namun masalah-masalah sosial yang konvensional serta modern akibat perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi telah menjadi tantangan tersendiri bagi Pancasila baik dalam konteks

pemahaman maupun di tataran implementasi oleh kelompok masyarakat dan penyelenggara negara.

Untuk membangun kehidupan yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dan mencerminkan budaya bangsa, diperlukan sebuah gaya komunikasi sehari-hari yang beretika, baik secara verbal maupun non-verbal. Penulis kedua dalam buku ini, Chontina Siahaan menyoroti hal itu dengan melihat pola komunikasi sosial kini yang seolah-olah melupakan tradisi warisan bangsa dengan adanya penghinaan, *character assassination*, penggunaan kata-kata kasar di media *online* maupun media sosial, penyebaran berita bohong (*hoax*), *black campaign*, hingga provokasi sosial bersifat tendensius yang dirangkum sebagai bentuk dari ujaran kebencian (*hate speech*). Untuk itu, menurut Chontina dalam tulisannya “Apa dan Mengapa Konsep Komunikasi Berwawasan Kebangsaan Itu?” bentuk komunikasi yang menjaga kesejukan dan ketenangan dalam menjaga persatuan kesatuan serta tidak membakar emosi perlu terus dibangun.

Selanjutnya, Donald Adrian dalam tulisannya yang berjudul, “Membangun Citra Politikus dalam Strategi Media Massa sebagai *Public Relations*,” melihat komunikasi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk membangun citra politikus melalui media massa yang dilakukan sebagai

bagian dari upaya *public relations*. Komunikasi sebagai bentuk *public relations* bagi politikus di dalam negeri menjadi penting saat ini mengingat masyarakat umumnya memandang negatif para politikus dan mengaitkan mereka dengan perilaku yang tercela. Dalam situasi seperti itu, media massa bisa menjadi pilihan yang tepat untuk memberitakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik dan membangun citra yang positif terhadap dirinya. Donal mencatat media massa menjadi sarana untuk publikasi karena ia mampu menyebarkan pesan secara serempak dan cepat kepada audiens yang luas dan heterogen. Beberapa aktor politik memanfaatkan media massa secara cerdas dan menjadikannya sebagai strategi yang tepat untuk meraih kepentingan politiknya.

Namun ketika komunikasi politik dilakukan dengan tujuan pencitraan sosial dalam meraih kepentingan politik, kebutuhan dan keadilan sosial justru terabaikan akibat ketiadaan atau kelemahan kebijakan publik. Hal inilah yang disorot oleh pemerintahan Jokowi-JK yang pada masa kampanye hingga awal pemerintahannya di tahun 2014 begitu gencar menyuarakan adanya *Revolusi Mental* sebagai poin utama dimulainya perubahan dengan menitikberatkan pada kesadaran sosial. Hal ini lahir dari keprihatinan terhadap berbagai situasi sosial yang dirasakan menjauh dari

cita-cita para *founding father*. Revolusi mental menjadi sebuah gerakan sosial yang dicita-citakan mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Terlebih dengan adanya tantangan bagi kesatuan Bangsa seperti merosotnya wibawa Negara, merebaknya intoleransi, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, yang menciptakan kesenjangan sosial bagi masyarakat.

Kesenjangan sosial ini menjadi pemicu polarisasi sosial yang pada akhirnya berujung pada potensi pecahnya konflik sosial hingga munculnya gerakan separatisme maupun gerakan yang berujung pada perlawanan sosial kepada pemerintah Indonesia. Kondisi ini diulas dalam tulisan Antie Solaiman yang berjudul, "Perlawanan Generasi Ketiga Papua Merdeka." Tulisan ini mengaji bentuk perlawanan masyarakat Papua generasi ketiga yang lebih akademis namun juga militan dalam memperjuangkan keadilan bagi warga Papua. Hambatan-hambatan terhadap tercapainya keadilan sosial yang merupakan tujuan utama Pancasila tidak semata muncul atau disebabkan oleh masalah internal dalam negeri. Peleburan nilai-nilai universal maupun nilai sosial hingga kebijakan internasional akibat adanya globalisasi tidak bisa dipungkiri turut serta menjadi tantangan bagi terciptanya keadilan sosial.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Hassan Wirajuda dalam pernyataan Pers Departemen Luar Negeri, perumusan politik lokal dan luar negeri Indonesia sejatinya merupakan sebuah proses “intermestik” yang saling kait mengkait satu dengan lainnya. Kebijakan publik di tataran lokal, nasional dan internasional terhubung dan saling mempengaruhi dengan satu tujuan yaitu tercapainya kepentingan nasional bangsa. Salah satu kepentingan nasional tersebut adalah mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia sebagaimana cita-cita Pancasila. Hal ini yang seharusnya dapat diwujudkan dengan melakukan perbaikan dalam berbagai sektor seperti halnya ekonomi, politik dan keamanan Indonesia di tataran lokal, nasional, regional hingga Internasional.

Keadilan sosial dapat terwujud dengan adanya perbaikan sendi-sendi ekonomi Indonesia, dimana Indonesia dapat belajar pada praktik penyelenggaraan sistem ekonomi neo-liberal dari Negara-negara berkembang di Amerika Latin. Sejumlah negara di kawasan ini sebelumnya terjebak dalam ketergantungan ekonomi terhadap Negara barat, sebagaimana diulas oleh Imelda Sianipar dalam tulisannya, “Menyorot Faktor Dominan Pendorong Amerika Latin Mengadopsi Model Neoliberalisme.” Penekanan kekuatan ekspor yang dilakukan oleh Negara-Negara Amerika Latin

sebagaimana yang lebih dahulu dilakukan oleh Asia Timur menjadi kunci kemajuan ekonomi. Adanya peran pasar yang kuat dibandingkan dengan peran Negara dapat menjadi sebuah analisa perbandingan guna memperbaiki kelemahan-kelemahan sendi ekonomi bangsa yang makin tergerus dengan adanya globalisasi dan perdagangan bebas.

Di sisi lain, penguatan ketahanan dan kapasitas bangsa guna mewujudkan keadilan sosial dapat terwujud dengan adanya ketahanan dalam bidang keamanan. Tekanan globalisasi dan pergerseran kekuatan pasca perang dingin, nyatanya melarutkan batas-batas kedaulatan di antara Negara dan membuka peluang terjadinya kejahatan lintas batas Negara sebagai bentuk ancaman keamanan non-tradisional yang tidak hanya mengancam Negara, namun hingga pada individu (*Human Security*). Indonesia dengan wilayah yang luas dan terdiri dari ribuan pulau, sangat rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan transnasional seperti halnya penyelundupan, perdagangan manusia, perdagangan senjata ilegal, pencurian ikan ilegal, pencemaran lingkungan, ancaman terorisme, perdagangan narkoba hingga pada kejahatan siber. Persoalan-persoalan keamanan lintas batas Negara tersebut, tentunya menjadi salah satu faktor penghambat terwujudnya keadilan sosial yang sangat bergantung pada stabilitas politik, ekonomi dan keamanan.

Untuk itu, perlu dirumuskan kebijakan dan strategi pemerintah dalam memberantas dan menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut, semisal 1) dalam penanggulangan penyalahgunaan penggunaan narkoba, pemerintah Indonesia dapat berkaca pada pola penanggulangan penyalahgunaan narkoba dari pemerintah Myanmar dengan pelaksanaan program pencegahan, melalui optimalisasi pendidikan dan sosialisasi, optimalisasi program pengobatan dan rehabilitasi, penegakan hukum dengan pendekatan “ramah HAM” dengan melibatkan secara lintas sektor dengan melibatkan aparat keamanan, hingga dengan menjalin kerjasama internasional dengan organisasi internasional terkait, 2) Sebagai upaya menciptakan ketahanan siber menyambut era perdagangan bebas dan *Asean Unity 2025*, Pemerintah Indonesia perlu membentuk badan siber nasional dan sandi Negara (BSSN) dalam upaya pemberantasan kejahatan siber hingga peningkatan kapasitas keamanan siber Indonesia; dan 3) pemerintah perlu membuat kebijakan kawasan yang sesuai dengan wawasan geopolitik Indonesia yang bertumpu pada aspek maritim dengan turut serta dalam pengawasan jalur laut internasional yang melewati Indonesia.

Berbagai kebijakan tersebut diulas dalam tulisan Sinta Herindrasti tentang “Perang Myanmar Melawan Narkoba, Menuju Kebijakan yang Lebih Manusiawi,” Indah Novitasari dalam “Implikasi Pendirian Badan Siber Nasional dan Sandi Negara (BSSN) terhadap Penguatan Kapasitas Keamanan Siber Indonesia Menyongsong Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN 2025,” dan tulisan Siti Merida yang berjudul, “Strategi Indonesia dalam Mengelola Wilayah Laut dengan Filipina di Laut Sulawesi Utara.” Keikutsertaan Indonesia secara aktif dalam perumusan kebijakan dan strategi di tingkat regional dan Internasional tentunya dapat menambah “posisi tawar” guna mencapai kepentingan nasional yang tak lain adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Jakarta, 5 Februari 2018

Tim Penyusun